

PANCASILA SEBAGAI MATA AIR NILAI KEINDONESIAAN: MENAFSIRKAN KEADILAN SOSIAL

Dr. Budhy Munawar-Rachman
(Dosen Filsafat STF Driyarkara Jakarta)

“Aku ingin membentuk suatu wadah yang tidak retak, yang utuh, yang mau menerima semua masyarakat Indonesia yang beraneka itu dan yang masyarakat Indonesia mau duduk pula di dalamnya, yang diterima oleh saudara-saudara beragama Islam, yang beragama Kristen, Katolik, yang beragama Kristen protestan, yang beragama Hindu Bali, dan saudara-saudara agama lain, yang bisa diterima oleh saudara-saudara yang adat istiadatnya begitu, dan yang bisa diterima oleh sekalian Saudara” (Soekarno, September 1955).

“Problem Pancasila adalah terlalu surplus ucapan dan terlalu minus tindakan, dan inilah yang menimbulkan keraguan banyak orang akan kesaktian nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan hidup sehari-hari” (2012: xvii). Maka lahirlah dua buku, pertama buku *Negara Paripurna* (2012) yang diniatkan sebagai paradigma pengetahuan, yang tak sekadar ucapan biasa namun distrukturkan dalam kerangka ilmu, diposisikan dalam pertarungan pemikiran dan ideologi dunia yang terus relevan; Kedua, *Mata Air Keteladanan* (2014), satu buku sumber teladan yang lebih afektif dan konatif.

Dua buku ini dapat disebut setangkup, yang satu menekankan aspek presisi melalui pendekatan kognitif, sementara yang kedua menekankan aspek impresi (kesan yang menggugah penghayatan dan pengamalan). Buku *Negara Paripurna* mendorong rasa bangga dan percaya diri bahwa Pancasila bukan sekadar dasar Negara yang dibuat terburu-buru, asal ada, melainkan sejenis “jalan ketiga-yang-menyelamatkan” di antara kemajemukan pemikiran, ideologi, dan kepentingan. Sementara buku kedua menegaskan Pancasila sebagai sumber nilai yang melahirkan karakter Pancasila. Untuk merancang buku kedua ini, Yudi Latif meyakini prinsip bahwa *moral is not taught but caught*. “Nilai-nilai keteladanan dan kepahlawanan tidaklah diajarkan (*taught*) secara kognitif lewat hafalan dan ‘pilihan ganda’ melainkan ditangkap (*caught*) lewat penghayatan emotif”.

Maka pada buku kedua, Yudi Latif menurunkan nilai-nilai dari kelima sila, seraya menunjukkan hidupnya nilai-nilai tersebut melalui kisah para tokoh *founding father* dan *founding mother*. Yudi ingin menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan produk gagasan, yang hanya

benar dalam dunia ide, melainkan saripati nilai dari perilaku para pendiri bangsa. Nilai-nilai yang diajukan Yudi Latif bukan seperti 36 butir atau 45 butir Pancasila pada Orde Baru, yang terlihat sempurna namun rapuh dalam implementasinya. Memang demikian, resiko dari perumusan nilai yang didasarkan pada gagasan, ia kehilangan jangkar di tengah lautan yang membuatnya terapung-apung atau hilang ditelan badai.

MERUMUSKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Yudi Latif merumuskan nilai-nilai yang dimiliki Pancasila. Ia misalnya, memeras masing-masing dari kelima sila menjadi 1 nilai utama: (1) sila pertama menjadi “Ketuhanan”; (2) sila kedua menjadi “Kemanusiaan”; (3) sila ketiga menjadi “Persatuan”, (4) sila keempat menjadi “Kerakyatan”, dan (5) sila kelima menjadi “Keadilan”.

Dari lima nilai hasil perasan lima Sila ini, Yudi Latif kemudian merumuskan 20 nilai, 1 sila diturunkan menjadi 4 (empat) nilai. Keempat nilai ini, tidak dirumuskan berdasarkan kata atau istilah yang ditemukan dari kalimat-kalimat lima sila. Nilai-nilai itu dirumuskan berdasarkan pemikiran dan laku teladan

dari para *founding fathers*, *founding mother*, (dan guru Bangsa ini). Pilihan produksi nilai ini menunjukkan bahwa nilai itu “sudah ada” dalam perilaku Manusia Indonesia, ia tinggal dipupuk, diurusutamakan, sehingga tumbuh menjadi nilai bersama seraya menghasilkan kehidupan sebagaimana dicita-citakan Pancasila.

Buku ini sedemikian detail mengurai kisah teladan satu tokoh ke tokoh yang lain, untuk membuktikan bahwa nilai dalam Pancasila bukan isapan jempol belaka, “sudah hidup” dan sekaligus “menunggu untuk dihidupkan kembali” pada masa kini dan ke depan. Sementara pada buku pertama, *Negara Paripurna*, Yudi Latif menunjukkan bukti bahwa gagasan Pancasila adalah gagasan besar di hadapan modernisme saat itu dan tetap bisa dijadikan pijakan untuk menanggapi tantangan zaman kini. Dua buku ini, seperti dua sisi mata pisau, dua-duanya sama tajam dan mengarah pada sisi yang sangat penting: gagasan dan nilai.

Yudi Latif telah membuka kembali Pancasila sebagai wacana terbuka. Ia telah meletakkan Pancasila dalam kancah wacana, juga dalam kisah sosok historis para guru bangsa. Yudi Latif misalnya, menunjukkan bahwa “dalam usaha membumikan Pancasila dari alam idealitas menuju alam realitas, kita perlu

menghayati fitrah (semangat asal) bernegara seperti yang dipesankan dan dicontohkan oleh para pendiri bangsa sendiri”.

Setidaknya bagi Yudi Latif, ada 8 fitrah pendiri bangsa dalam mewujudkan NKRI, yakni Ketuhanan, Kekeluargaan, Ikhlas, Pengabdian, Menghasilkan yang Terbaik, Keadilan dan Kemanusiaan, Semangat Juang, dan Fitrah Batin. Cara penghayatan Yudi Latif menghasilkan kedua buku ini, tentu saja bagi subyek lain dengan model penghayatan yang berbeda akan menghasilkan tafsir yang berbeda pula.

MENGHIDUPKAN NILAI PANCASILA

Dalam kerangka Pendidikan Nilai Pancasila, buku Yudi Latif yang kedua tentu lebih bisa dijadikan pijakan pengembangan. Di samping, sejak awal buku tersebut mendasari prinsip nilai sebagai “yang dilihat” bukan “yang diajarkan/digagaskan”, serta memiliki prinsip dasar “semua manusia memiliki nilai dan harga dirinya” yang menunggu “dilahirkan”. Dengan kata lain, nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila didekati dengan metode menghidupkan nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dirumuskan ke dalam satu kata yang konseptual bukan dalam bentuk kalimat. Kelima sila dirumuskan ulang kembali menjadi konsep-konsep nilai universal yang mampu dikhidmati oleh seluruh

individu warga Negara Indonesia, yang bisa diurai ringkas sebagai berikut:

SILA PERTAMA

Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, misalnya, telah diturunkan oleh Yudi Latif (dengan merujuk pada Soekarno) sebagai “Ketuhanan yang Berkebudayaan” kemudian disarikan lagi menjadi “Ketuhanan”, diterjemahkan menjadi 4 nilai, yakni: (1) Berketuhanan, (2) Berketuhanan yang Welas Asih dan Toleran, (3) Berani Memperjuangkan Kebenaran dan Keadilan, dan (4) Berbuat baik dengan Amanah, jujur, Bersih.

Secara sederhana pada gagasan Yudi tersebut, terdapat beberapa nilai yang bisa disebutkan dengan nilai-nilai yang lebih universal, seperti beriman, welas asih, toleran, berbakti (bertindak baik demi nilai mulia), amanah, jujur, dan bersih. Dari nilai-nilai inilah kemudian Pendidikan Nilai Pancasila berpijak, sehingga seluruh metode dan atau pendekatannya seperti kesadaran nilai, merancang mimpi masa depan, keterampilan berbasis nilai, dan sebagainya diterapkan dalam menghidupkan nilai-nilai Pancasila tersebut.

Maka, perlu dirumuskan terlebih dahulu nilai dari masing-masing sila. Sebagai contoh, berikut ini dikemukakan prinsip, nilai, dan keteladanan dari Sila Pertama: *Ketuhanan Yang Maha Esa*, yaitu Sila

pertama adalah sila yang paling hangat dibicarakan sampai saat ini. Pangkalnya bermula dari konsep pemisahan atau penyatuan antara agama dan Negara. Sejak perumusan dasar Negara, perdebatan itu muncul. Yudi Latif menceritakan perdebatan itu dengan komprehensif pada buku *Negara Paripurna*, tak ada satupun yang tidak mau berlandaskan ketuhanan, bahkan Tan Malaka (sebagai wakil dari Partai Komunis mensyaratkan perlunya agama atau Ketuhanan sebagai basis pergerakan).

Jauh-jauh hari, pada tahun 1928, para jenius bangsa telah mengemukakan kerumitan hubungan antara agama dan Negara ini, Soekarno dan Agus Salim pernah menulis gagasan ini. *Nasionalisme kita adalah Nasionalisme ketimuran dan sekali-kali bukanlah Nasionalisme kebaratan yang menurut perkataan CR Das adalah suatu Nasionalisme yang menyerang-nyerang, suatu Nasionalisme yang mengejar keperluannya sendiri. Suatu nasionalisme perdagangan yang untung rugi. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang membuat kita menjadi "perkakasnya Tuhan" dan membuat kita hidup dalam roh* (Soekarno, Suluh Indonesia, 12 Agustus 1928).

Soekarno menegaskan Tuhan harus tetap ada dalam nasionalisme (sebagai bentuk negara yang tidak berdasarkan

agama), nasionalisme Indonesia harus menjadi "perkakasnya Tuhan" yang "hidup dalam roh". Hal serupa dikemukakan oleh Agus Salim: *"Sebab benda dan rupa dunia habis gunanya, apabila nyawa sudah tiada. Maka sebagai dalam tiap-tiap hal yang mengenai dunia kita, demikian juga dalam cinta tanah air, kita mesti menunjukkan cita-cita yang lebih tinggi daripada segala benda dan rupa dunia, yaitu kepada hak, keadilan dan keutamaan yang batasnya dan ukurannya telah ditentukan oleh Allah SWT"* (Agus Salim, 1928, dalam Koran Fajar Asia).

Saat perumusan dasar Negara, tanggal 31 Mei 1945, perdebatan menarik antara Negara berbasis Islam atau kesatuan muncul lebih deras. Pada sisi Islam, untuk menyebut salah satunya, terdapat Ki Bagoes Hadikoesoema yang berhadapan dengan Dr. Soepomo dari kubu nasionalis. Ki Bagoes Hadikoesoema mengemukakan dengan tegas ihwal perlunya Islam sebagai dasar Negara. Ia menyatakan bahwa "agama merupakan pangkal persatuan", "Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan, berdasar kerakyatan dan musyawarah serta kebebasan memeluk agama", "Islam tidak bertentangan bahkan sesuai dengan kebangsaan kita", "Islam merupakan ajaran lengkap yang menyuruh

masyarakat didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam", dan "selama periode kolonial kaum imprealis senantiasa berusaha melenyapkan agama Islam dan hukum Islam".

Pada pihak lain, Soepomo menyatakan ihwal perlunya kesatuan semua orang di Indonesia. Mendirikan Negara Islam, bagi Soepomo, membuat agama-agama yang kecil, tidak bisa mempersatukan dirinya dengan Negara, karena itu "Negara kesatuan" lebih dipilih agar semuanya bisa merasa memiliki. Walaupun demikian, "Negara nasional yang bersatu", ujar Soepomo, "tidak berarti 'a religius'. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur, akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka Negara demikian itu dan hendaknya Negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, yang dianjurkan juga oleh agama Islam".

Ada perdebatan, sekaligus ada upaya menemukan jalan tengah: bukan Negara agama, namun Negara tanpa agama. Semua jenius bangsa ini menyadari tingkat kerumitan masalah ini, Ketuhanan (sebagai simbol dari agama) harus tetap menjadi roh kehidupan bernegara, namun bukan berarti sebagai Negara agama. Muhammad Hatta mengemukakan gagasan sekularisasi yang menarik, "bukan perpisahan antara agama dan Negara" tetapi

perpisahan antara urusan agama dan urusan Negara, *"Kita tidak akan mendirikan Negara dengan dasar perpisahan antara "agama" dan "negara", melainkan mendirikan Negara modern di atas dasar perpisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang oleh Negara, maka agama menjadi perkakas Negara, dan dengan itu hilang sifatnya yang murni"* (Mohammad Hatta, dalam 'Agama dan Negara', 1945).

Masing-masing pemeluk dan organisasi agama masih diberi kebebasan mengelola urusan agamanya, Negara tidak boleh ikut campur, namun bukan berarti Indonesia adalah Negara agama. Gagasan serupa secara lebih artikulatif dikemukakan Soekarno: *"Bukan saja Bangsa Indonesia ber-tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad saw, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi, marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia, ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama". Dan, hendaknya*

Negara Indonesia satu Negara yang bertuhan" (Soekarno, uraian prinsip Ketuhanan, 2012: 74).

Frasa "Bangsa Indonesia ber-Tuhan" atau dalam wacana sekularisme "Negara ber-Tuhan" adalah konsep jalan tengah dari "Negara Agama" versus "Negara tanpa Agama". Indonesia bukan Negara Agama, tetapi Negara ber-Tuhan, demikian kira-kira jalan tengah yang dihasilkan para jenius bangsa yang tidak bisa membayangkan ruang publik Indonesia hampa Tuhan. Sebagai "Bangsa yang ber-Tuhan", Indonesia mengizinkan adanya pelbagai agama, bahkan mendorong semua rakyat Indonesia menjalankan agamanya masing-masing. Agar tidak terjadi pertentangan antar agama; yang pada dirinya memiliki klaim lebih benar seraya menganggap agama lain tidak benar, cara ber-Tuhan ini diselenggarakan secara berkebudayaan.

Ketuhanan yang berkebudayaan oleh Soekarno diterjemahkan sebagai "dengan tiada egoisme-agama", Hatta menyebutnya sebagai "pemisahan urusan agama dan urusan Negara, bukan pemisahan agama dan Negara". Kedua rumusan ini ditafsirkan Yudi Latif sebagai "toleransi kembar", yakni "Situasi ketika institusi agama menyadari batas otoritasnya untuk kemudian mengembangkan toleransi terhadap fungsinya masing-masing

(2012: 101). Karena itu, bagi Yudi Latif, ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai Ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan (2012: 115). Sebab, pada hakikatnya, setiap agama memiliki kepedulian bersama dalam persoalan publik yang menyangkut keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, dan keberadaban. Oleh karena itu, setiap agama harus mencari titik temu dalam semangat gotong-royong untuk membentuk semacam "civic religion" bagi pengelolaan ruang publik bersama (2012: 119).

Toleransi kembar mendorong semua pemeluk agama menjalankan agamanya secara taat sesuai dengan ajarannya masing-masing, namun di ruang publik semuanya bersatu mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik-politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Melalui cara ini, Indonesia tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan sekaligus nilai kebangsaan, atau— meminjam istilah Soekarno—menjadi "Negara sebagai perkakas dari Tuhan" dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sinergi ini "diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter, melahirkan bangsa dengan etos kerja

positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.

Semua perdebatan gagasan bernas itu dikemukakan Yudi Latif pada buku *Negara Paripurna* (2012) yang diperkuat dengan kisah-kisah perilaku dalam buku *Mata Air Keteladanan* (2014). Buku *Mata Air Keteladanan* sedang menunjukkan bahwa gagasan Pancasila bukan gagasan kosong, tetapi sudah hidup dan dihidupi oleh rakyat Indonesia, bahkan oleh tokoh-tokoh agama. Beberapa kutipan dari buku *Mata Air Keteladanan* dapat dikemukakan berikut ini. *“Terbanglah kapal udaraku datang di daerah Aceh, Rakyat Aceh menyambut kedatangan Presiden, rakyat beragama Islam. Terbang, lagi kapal udaraku, turun di Siborang-borong daerah Batak. Rakyat Bayak menyambut dengan gegap-gempita kedatangan Presiden Republik Indonesia, agamanya Kristen.”*

Demikian pidato Soekarno (Kongres Rakyat Jawa Timur, 24 September 1955) menggambarkan apa yang disebut Yudi Latif “toleransi kembar”: tetap taat dalam agamanya masing-masing, namun bersatu memuliakan dan membangun bangsa. Pidato Soekarno ini adalah bukti implementasi

“ketuhanan yang berkebudayaan” yang dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia secara alamiah. Pada ranah pergaulan hidup kemasyarakatan, tokoh bangsa menunjukkan laku toleransi kembar ini, di antaranya: Bung Hatta misalnya, menjalin hubungan yang saling mengasihi dengan tokoh Ahmadiyah, Sayyid Shah Muhammad al-Jaeni, keduanya saling menjenguk saat sakit, saling bertukar gagasan.

Kyai Ahmad Dahlan, seorang penganjur Islam “murni” (puritan) ternyata sangat toleran pada tokoh-tokoh Budi Utomo yang abangan, satu relasi yang kemudian berbalas kebaikan: saat Muhammadiyah dibangun di Karangjaten, orang-orang Budhi Utomo meminjamkan uang dan meminjamkan uang ke Bank. Kemudian saat KH. Hasyim Asyari menyerukan pentingnya persatuan pada Mukhtar NU ke-11, 1936, Hamka (yang Muhammadiyah) menyambut dengan apresiatif, *“Wasiat keagamaan yang sangat penting, tidak saja bagi anggota NU, tetapi juga bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Wasiat ini tidak saja penting selama hidup Hadratus Syaikh, tetapi juga menjadi pedoman bagi setiap Muslim setelah kepergian beliau”*. Keseluruhannya ini, dan tentu ada banyak kisah teladan lain, adalah bukti

hidupnya “toleransi kembar”.

Toleransi Kembar ini didasari oleh welas asih, karena *“saling menolong dan membantu serta saling mencintai itulah dasar segala agama”*, tulis RA Kartini. Prinsip Welas Asih inilah yang diperjuangkan dan diajarkan KH. Ahmad Dahlan saat ia berulang kali membaca surat al-Maun agar jemaah Muhammadiyah *“mencari orang yang paling miskin di sekitarnya, kemudian diminta memandikannya dan menyuapinya”*. Prinsip Welas Asih ini juga dikemukakan oleh Hatta dengan bernas: *“Masing-masing golongan bisa memahami arti Ketuhanan Yang Maha Esa itu menurut paham agamanya. Tetapi, nyatalah bahwa inti dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu ialah penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jikalau di antara manusia dengan manusia tidak ada harga menghargai, maka tidak bisa dicapai satu susunan dunia. Di antara manusia ada yang kaya ada yang miskin, ada yang berbeda kecakapannya, ada yang bodoh ada yang pintar, tetapi sebagai makhluk Tuhan ia dipandang sama”* (Hatta, 1977).

Keseluruhan uraian mengenai sila pertama di atas menunjukkan satu kerangka pengembangan Pancasila sebagai nilai yang hidup dan dihidupi. Perdebatan Negara agama versus Negara sekular telah

selesai dengan jalan tengah “Negara ber-Tuhan”. Pelaksanaan beragama di Negara ber-Tuhan didasarkan pada kesadaran berkebudayaan yang tidak didasarkan “egoisme-agama”. Ketuhanan yang berkebudayaan itu adalah cara beragama yang “memandang sama pada semua makhluk Tuhan”, sehingga muncul sikap “harga-menghargai”, “saling menolong dan membantu serta saling mencintai”. Nilai inti dari Sila Pertama, kemudian dikuatkan oleh sila-sila lainnya, adalah welas asih atas dasar Cinta Tuhan, yang proaktif, kemudian melahirkan sikap berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan, berbuat baik dengan amanah, jujur, dan bersih.

SILA KEDUA

Kerangka yang sama dapat dirumuskan juga pada sila-sila lain. Pada sila kedua: *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, Yudi Latif misalnya merumuskan bahwa konsekuensi dari diterapkannya nilai kedua ini bersifat ganda, yakni ke dalam dan ke luar: *Pertama*, ke dalam: Menjadi pedoman negara untuk memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak dasar/asasi manusia, dengan menjalankan fungsi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Di samping itu, sebagai penguat aspek ke dalam, di tempat lain ditegaskan: Negara berdasar atas

ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab itu menuntut pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur (2012: 243). *Kedua*, ke luar: Menjadi pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka “ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Konsep “Kemanusiaan” yang universal, sebagai pengaruh dari humanisme modern, menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara yang terbuka. Indonesia bukan Negara untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kemanusiaan secara universal berdasarkan ketuhanan. *Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa-bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsyafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyesuaikan hidup kebangsaannya dengan dasar perikemanusiaan yang universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan, yang seluas-luasnya, pula dalam arti kenegaraan pada khususnya* (Ki Hajar Dewantara, dikutip dari Pancasila Dasar Falsafah Negara karya Notonagoro, 1974: 11).

Prinsip kemanusiaan dari sila kedua ini memiliki konteksnya saat ini. Di tengah krisis dan tantangan globalisasi, Indonesia harus mampu menempatkan kepentingan nasional dalam bingkai nilai kemanusiaan, dengan menjaga sikap empati bagi yang menderita dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam memecahkan konflik dalam masyarakat nasional dan internasional. Suatu *vision* perlu didukung oleh *passion* agar ideal-ideal kemanusiaan bisa diwujudkan di bumi kenyataan” (2012: 242). Ada nilai empati, pada sila kedua. Nilai yang pada sisi tertentu lahir dari nilai welas asih.

SILA KETIGA

Sila ketiga: *Persatuan Indonesia*, bagi Yudi Latif diletakkan dalam kerangka *civic-political-nationalism* yang mensyaratkan loyalitas warga pada seperangkat cita-cita politik dan kelembagaan yang dianggap adil dan efektif (2012: 374). Selain itu, dalam mentransformasikan ke-*Kami*-an menuju ke-*Kita*-an, diperlukan sikap positif dan prasangka baik. Kerjasama dan sikap saling memercayai serta iktikad baik masing-masing komunitas yang diperkuat oleh jalinan gotong-royong secara fungsional antara pelbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi demokrasi dalam suatu masyarakat

multikultur (2012: 376). Dan karenanya: kebangsaan Indonesia adalah ekspresi rasa syukur atas desain sunnatullah (hukum Tuhan) yang menciptakan perbedaan, dengan menjunjung tinggi kesetaraan kemuliaan manusia, dengan mengembangkan sikap positif terhadap kemajemukan bangsa, melalui perwujudan demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial (2012: 376).

Prinsip-prinsip nilai “persatuan” ini telah dibangun oleh para jenius bangsa, seperti terlihat pada kutipan berikut: *“Manusia harus bersatu, agar tercipta kebaikan dan kesejahteraan, dan agar terhindar dari kehancuran dan bahaya. Jadi, kesamaan dan keserasian pendapat mengenai penyelesaian beberapa masalah adalah prasyarat terciptanya kemakmuran. Ini juga akan mengukuhkan rasa kasih sayang. Adanya persatuan dan kesatuan telah menghasilkan kebajikan dan keberhasilan. Persatuan juga telah mendorong kesejahteraan Negara, peningkatan status rakyat, kemajuan dan kekuatan pemerintah, dan telah terbukti sebagai alat untuk mencapai kesempurnaan. Satu dari banyak tujuan persatuan adalah bersemainya kebajikan yang akan menjadi sebab terlaksananya berbagai ide”* (KH. Hasyim Asy’ari dalam Al-Mawaizh, pada

Muktamar NU Ke-11 di Banjarmasin, 1936)

Sebeloem kami memoelai membitjarakan ini, patoetlah rasanja kalau kami terangkan lebih dahoeloe, mengapa kami tidak memakai bahasa Belanda atau bahasa Djawa. Boekan sekali-kali karena kami hendak merendahkan bahasa ini, atau mengoerang-ngoerangkan harganja. Itoe sekali-kali tidak. Tetapi barang siapa di antara toean jang mengoendjoengi kerapatan pemoeda di kota Djacatra (Betawi), jang diadakan beberapa boelan jang laloe atau setelah membatja poetoesan kerapatan jang terseboet, tentoe masih mengingat akan hasilnja, jaitu hendak berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia, hendak bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia, dan hendak mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia. Oleh karena jang tersebut inilah maka kami sebagai poetry Indonesia jang lahir di poelau Djawa jang indah ini berani memakai bahasa Indonesia dimoeka ra’jat kita ini. Boekankah kerapatan kita kerapatan Indonesia, ditimboelkan oleh poetry Indonesia dan dioentoekkan bagi seloeroeh kaoem istri dan poetry Indonesia, beserta tanah toempah darah dan bangsanja. (Siti Soendari, dalam Kongres Perempuan Indonesia, 22-25 Desember 1928)

Masyarakat yang terkotak-kotak dengan masing-masing penuh curiga kepada

satu sama lainnya bukan saja mengakibatkan tidak efisiennya cara hidup demokratis, tapi juga dapat menjurus kepada lahirnya pola tingkah laku yang bertentangan dengan nilai asasi demokrasi. Pengakuan akan kebebasan nurani (freedom of conscience), persamaan hak dan kewajiban bagi semua (egalitarianism), dan tingkah laku penuh percaya kepada itikad baik kepada orang dan kelompok lain mengharuskan adanya landasan pandangan kemanusiaan yang positif dan optimis (Nucholish madjid, 1995: 67).

Dari sila ketiga, lahir nilai kerjasama, gotong royong, yang meleburkan ke-Kami-an menjadi ke-Kita-an. Dalam “Kita”, muncul sikap positif dan prasangka baik, kerja sama dan sikap saling memercayai serta itikad baik dalam jalinan gotong-royong. Sila ketiga dapat disederhanakan sebagai implementasi dari prinsip kekeluargaan, terus bersama di tengah sejumlah perbedaan, jika ada konflik dan masalah itu berarti undangan untuk menyelesaikannya secara bersama. Ke-Kita-an ini dibangun oleh rasa mencintai, rasa persatuan, rasa kekeluargaan yang hanya bisa diwujudkan dengan kerelaan berkorban, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan” (2012: 343). *Berani merdeka berarti berani mempertahankan Indonesia, dan ini berarti berani*

berperang. Buat ini perlu persatuan sekokoh-kokohnya. Persatuan berarti bebas dari rasa perselisihan antara golongan, menyingkirkan diri, dan golongan sendiri, hanya dapat tercapai dengan korban (Sosrodiningrat, 29 Mei 1945, dalam pembentukan BPUPK).

SILA KEEMPAT

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah/Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan melahirkan nilai lain yang saling terkait dengan sila lainnya. “*Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* (Notonegoro, 1974).

Sila ini digali dari konteks bahwa prinsip pemerintahan mayoritas—berdasarkan kesetaraan hak warga negara (demokrasi)—dengan menghormati hak-hak minoritas (*majority rule, minority rights*) mengandaikan adanya kedaulatan rakyat berlandaskan semangat kekeluargaan (2012: 379).

Sila keempat, dengan kata kunci “hikmah” dan “permusyawaratan”

menuntut agar segala kekuatan dalam masyarakat, tanpa pandang bulu, harus diberi akses ke dalam proses pengambilan keputusan. Wakil-wakil rakyat berdialog dengan pengetahuan dan kearifannya, bukan dengan kepentingan kelompoknya. Dengan bimbingan hikmat-kebijaksanaan, perilaku politik yang etis akan berkembang (2012: 487). Permusyawaratan menguatkan “ke-Kita-an” ke dalam tindakan praksis kehidupan bersama, mufakat menjadikan ke-Kita-an menjadi dinamis dan progresif.

Dasar itu ialah mufakat, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu Negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan Negara ‘untuk semua’, ‘satu untuk semua, semua untuk satu’. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan (Soekarno, 1 Juni 1945).

Sila keempat, atau permusyawaratan perwakilan, menciptakan demokrasi model Indonesia yang khas, yang tidak identik dengan gagasan asli demokrasi di Barat. “... *Bagi kita bangsa Indonesia, demokrasi atau kedaulatan rakyat mempunyai corak nasional, satu corak kepribadian kita, satu corak yang tidak perlu sama dengan corak demokrasi*

yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa lain sebagai alat teknis. Artinya, demokrasi kita adalah demokrasi Indonesia, demokrasi yang disebut sebagai sila keempat itu adalah demokrasi Indonesia yang membawa corak kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Tidak perlu ‘identik’ artinya sama dengan demokrasi yang dijalankan oleh bangsa-bangsa lain (Soekarno, 1958).

Selain permusyawaratan perwakilan demi mufakat, demokrasi permusyawaratan didasarkan pada hikmah/kebijaksanaan. Yudi Latif menafsirkan hikmah itu menjadi empat prasyarat penetapan keputusan politik, yakni: (1) Bersifat imparial (tanpa pandang bulu), dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal diktator mayoritas dan tirani minoritas; (2) Didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau golongan; (3) Berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif); dan (4) Harus didasarkan pada asas rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan”. Dari sila ke-4

ini lahir nilai musyawarah, memperkuat ke-Kita-an dengan berbagai pengetahuan dan kearifan, serta kerelaan untuk dipimpin berdasarkan panduan hikmah-kebijaksanaan.

SILA KELIMA

Sila kelima, *Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia*, satu sila yang diangankan oleh Soekarno sebagai *prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka* (Soekarno, 1 Juni 1945). Kesejahteraan adalah wujud merdeka 100% dalam istilah Tan Malaka: *"Merdeka 100%" adalah jaminan buat terus merdekanya Indonesia. Tanpa merdeka 100%, Indonesia takkan bisa mengadakan kemakmuran cukup buat dirinya sendiri*" (Tan Malaka, 2005: 40).

Perwujudan sila kelima terealisasi dalam peyelenggaraan Negara kesejahteraan, dan "perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab, rasa kemanusiaan dan keadilan yang terpancar pada setiap warga".

Dari sila kelima ini, selain kesejahteraan, juga lahir nilai keadilan. Nilai keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, mantra

kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya (2012: 606). Sebab, kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan keadilan sosial (2012: 607).

Terdapat banyak nilai yang lahir dari Pancasila. Keseluruhan nilai Pancasila dapat dirujuk pada pernyataan Mohammad Hatta: *Indonesia, luas tanahnya, besar daerahnya, dan tersebar letaknya. Pemerintahan Negara yang semacam itu hanya dapat diselenggarakan oleh mereka yang mempunyai tanggung jawab yang sebesar-besarnya dan mempunyai pandangan yang amat luas. Rasa tanggung jawab itu akan hidup dengan memikirkan lebih dahulu kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa. Untuk mendapat rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya, kita harus mendidik diri kita dengan rasa cinta akan kebenaran dan keadilan abadi. Hati kita harus penuh dengan cita-cita besar, lebih besar dan lebih lama umurnya daripada kita sendiri.* Hatta menegaskan perlunya nilai tanggung jawab, pandangan yang luas, empati, kehormatan, cinta, dan keadilan, yang kesemuanya didasarkan pada hikmah/kebijaksanaan.

ELABORASI LEBIH LANJUT KHUSUS SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Prinsip No. 4 sekarang saya usulkan ... yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka (Soekarno, 1 Juni 1945). Berakar dari suasana kontekstual Indonesia yang memiliki tujuan kemerdekaan berbentuk keadilan yang berujung pada kesejahteraan. Sejalan dengan ini, sejatinya bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi tidak bisa dipisahkan dan saling terkait.

Bentuk: kesadaran keadilan ekonomis dalam pergerakan bangsa Indonesia pertama-tama tumbuh di lingkungan pedagang. Selain itu: kritik ideologi Marxisme atas kapitalisme-kolonialisme juga merangsang proses pembelajaran sosial bagi elemen-elemen pergerakan yang ada. Hanya saja—dalam sosialisme Islam, perjuangan untuk keadilan ekonomi yang bersifat material itu jangan sampai jatuh pada penghambaan terhadap materi (materialisme). Oleh karena itu, tuntutan keadilan tersebut harus diletakkan dalam kerangka nilai-nilai ketuhanan.

Tindakan: pada puncaknya, bentuk keadilan ekonomis ini mewujud dalam bentuk koperasi. Singkatnya, persatuan dan kerjasama (kooperasi) dipandang sebagai sokoguru dalam

usaha merebut kedaulatan dan keadilan ekonomi. Selain itu, demi mewujudkan keadilan sosial dalam perumusan Pancasila dan konstitusi, salah satunya disarikan dari keinsafan bahwa: sifat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat pertanian, maka dengan sendirinya tanah menjadi lapangan hidup—sebab, Negara hanya bisa adil jika negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat kepada cita-cita luhur. Dengan demikian: negara Indonesia tidak dikehendaki sebagai “negara liberal”, melainkan sebagai “negara kesejahteraan” (negara sosial). Hal ini menghasilkan konsekuensi atas komitmen keadilan. Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara mewujudkan keadilan sosial, setidaknya dalam kerangka: (1) Perwujudan relasi yang adil di semua tingkat sistem (kemasyarakatan). (2) Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan. (3) Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan. (4) Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Semua tersebut di atas adalah sistem ekonomi Pancasila: bahwa sistem ekonomi Pancasila

menekankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang berorientasi kerakyatan (publik secara keseluruhan), dengan bersendikan nilai etis ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sokoguru perekonomian untuk merealisasikan sistem ekonomi Pancasila itu adalah prinsip “gotong-royong” (kooperasi). Tujuan yang hendak dicapai oleh perekonomian yang bersifat kooperasi hendak mewujudkan perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, bahagia lahir dan batin.

Nilai: Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, mantra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Sebab, kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan keadilan sosial.

Jika kita kembali urutkan nilai-nilai yang diambil dari konteks serta yang menopang bangunan nilai sila ke-5 ini, secara berurutan sebagaimana berikut: Keadilan sosial akan tercapai jika ada: (1) kesadaran keadilan

ekonomi tercapai, yang mana kesadaran ini akan membumi dengan cara menghidupkan nilai: (2) persatuan dan kerjasama (kooperasi)

KETELADANAN DAN PENGAMALAN KEADILAN SOSIAL

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Notonagoro, 1974).

Masyarakat adil dan makmur adalah tujuan terakhir dari revolusi Indonesia, sekaligus wujud nyata keadilan dan kesejahteraan dari idealitas Pancasila. Jalan mencapai keadilan sosial menghendaki perwujudan negara kesejahteraan ala Indonesia, disertai partisipasi pelaku usaha dan masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan. Sesuai kapasitasnya, setiap warga Negara harus bergotong-royong memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan jaminan pelayanan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melakukan pembangunan berkelanjutan untuk keadilan dan perdamaian dengan karakter kemandirian, sikap hemat, etos kerja, dan ramah lingkungan.

Perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab, rasa kemanusiaan dan keadilan yang terpancar pada setiap warga. Dalam visi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip: “Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”. Maka dari itu, pokok pikiran keempat UUD 1945, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”, mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan para penyelenggara negara untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

TOKOH KETELADANAN DALAM PENGAMALAN KEADILAN

“Merdeka 100%” adalah jaminan buat terus merdekanya Indonesia. Tanpa merdeka 100%, Indonesia takkan bisa mengadakan kemakmuran cukup buat dirinya sendiri. Juga Indonesia walaupun merdeka takkan bisa mempersenjatai dirinya sendiri, karena tidak akan diberi kesempatan oleh kapitalisme asing buat mendirikan “Industri Berat Nasional”. Kemerdekaan Indonesia abad ke-20 ini tidak bisa dipisahkan dari “Industri Berat Nasional” dan “Rencana Ekonomi” (Tan Malaka, 2005: 40).

Pada nilai ini, tokoh utamanya adalah Johannes Leimena (kepedulian pada usaha kesejahteraan sosial, h. 480); Driyarkara (perwujudan khusus dari nilai kemanusiaan, h. 483). Selain itu, kita dapat menemukan contoh keteladanan lain dari uraian ringkas berikut:

Memajukan

Kesejahteraan Umum:

Soekarno (cita dan kerja keadilan-kemakmuran, h. 487-88); Mohammad Yamin; Soerio; A. Rachim Pratalykrama; Abdul Kadir; Ki Bagus Hadikoesoemo (memajukan keadilan dan kesejahteraan umum, h. 490); Hatta (koperasi dan kesejahteraan rakyat, h. 494-5); R. Ng. Aria Wiriatmadja (tradisi demokrasi desa, h. 495); K.H. Hasjim Asy’ari (koperasi dan swadaya santri, h. 496); I.J. Kasimo (meningkatkan produksi pangan, h. 500); Soeharto (program kesejahteraan, h. 502); H.M. Nurdin Abdullah (mengangkat kesejahteraan rakyat, h. 504); H. Abdulghani Aziz; Dahlan Sapi-ie; Johan Johor; Mr. Sjarifuddin Prawiranegara; Mr. Asaat, Sugijo; Naim; Otto Iskandar Dinata (membangun daulat ketahanan ekonomi, h. 510); William Soerjadaja (pemimpin yang menciptakan lapangan kerja, h. 512); B.R.A. Mooryati Soedibyo (kepedulian memajukan kesejahteraan, h. 513); FX Bambang Ismawan; Sayogyo; Suradiman (pelopor gerakan LSM Indonesia, h. 519); Ustad

Umar Sanusi (filantropi dan kewirausahaan, h. 520); Aleta Baun (alam untuk masyarakat, h. 523).

Menyelenggarakan

Jaminan-Pelayanan Sosial:

Tirto Adi Surjo (perintis pendirian pers, h. 532); Tjipto Mangoenkoesoemo (welas asih melayani kesehatan masyarakat, h. 533); Ernest Douwes Dekker; Ki Hadjar Dewantara (mengupayakan kesehatan masyarakat, h. 533); Oen Boen Ing (keadilan dan welas asih dalam menolong, h. 535); Sugeng Siswoyudono (menumbuhkan semangat harapan, h. 536); I Gede Winasa (pelayanan kesehatan masyarakat, h. 543); Hj. Andi Rabiah (pelayanan kesehatan lintas pulau, h. 543).

Mencerdaskan Kehidupan

Bangsa: Ki Hadjar

Dewantara (memuluskan jalan pendidikan dan memajukannya, h. 547); R.A. Kartini; Dewi Sartika; Roehana Koeddoes; Maria Walanda-Maramis (pelopor wanita terpelajar, h. 549); Soekarno (menyasar pendidikan dasar: investasi manusia dan material, serta investasi mental, h. 554); La Ode Manarfa (perhatian besar pada dunia pendidikan, h. 559); Saur Marlinang Manurung (kedilan pendidikan, h. 652); Ahmad Baharuddin (mendobrak pendidikan eksil, h. 564); Yohanes Surya (pengembangan diri bagi talenta terbaik bangsa, h. 567).

Pembangunan Berkelanjutan untuk Keadilan dan Perdamaian:

Tan Malaka (keleluasaan menentukan nasib sendiri, h. 572); Bung Hatta (kebijakan ekonomi sadar diri, h. 572); Roesman Anwar (kepemimpinan dan sikap bijak, h. 572-3); Soekarno (ekonomi berdikari, h. 573); Mar'ie Muhammad (kebersihan birokrasi, h. 576); Yosepha Alomang (perjuangan pembangunan berkelanjutan, h. 580); TGH

Hasanain Juaini (inovasi pendidikan berkelanjutan, h. 583); K.H. Fuad Affandi (ekonomi kreatif santri, h. 586); Jusuf Kalla (mengetengahkan perdamaian, h. 586-88); Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty (resolusi konflik, h. 589-91).

Akhirnya

“Perwujudan negara kesejahteraan itu sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—

disertai dukungan rasa tanggung jawab, rasa kemanusiaan dan keadilan yang terpancar pada setiap warga”.

SUMBER BACAAN:

LATIF, YUDI. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*. Jakarta: Mizan, 2014.

LATIF, YUDI. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.



SUMBER GAMBAR:

<https://observerid.com/reactualization-of-pancasila-as-the-state-ideology/>